

SOSIALISASI HIBAH KHUSUS PAMSIMAS DAN HIBAH INSENTIF DESA TAHUN 2020



Professional management is the effective use of water



PAMSIMAS

PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

LATAR BELAKANG

- Hibah Khusus Pamsimas (HKP) merupakan modifikasi dari Hibah Insentif Kabupaten (HIK). Hibah Khusus ini dilaksanakan sebagai dukungan peningkatan kualitas pelayanan serta perbaikan kinerja SPAM perdesaan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa termasuk fungsionalisasi yang sudah dibangun melalui program Pamsimas.
- Hibah akan diberikan kepada kabupaten yang telah melaksanakan Pamsimas yang masih membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi pelayanan SPAM saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia.
- Pelaksanaan HKP di tingkat desa mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas desa baru dengan beberapa penyesuaian tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut.

PRINSIP

- a. Pola kemitraan melalui sharing program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat;
- b. Hibah Khusus menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam perbaikan pelayanan air minum berbasis masyarakat;
- c. Panitia Kemitraan (Pakem) / POKJA AMPL Kabupaten memfasilitasi proses pemilihan desa/kelurahan penerima Hibah Khusus Pamsimas untuk diputuskan dan ditetapkan di tingkat kabupaten;
- d. Pagu dana Hibah Khusus untuk masing-masing desa/kelurahan diajukan oleh Bupati, berdasarkan RKM yang telah diverifikasi.

TUJUAN

- a. Meningkatkan kapasitas kabupaten untuk peningkatan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- b. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
- c. Mendukung percepatan pencapaian target Universal Access kabupaten dalam bidang air minum dan sanitasi;
- d. Mendukung kegiatan optimalisasi SPAMS tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas;
- e. Menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan jangkauan/kualitas pelayanan tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi pada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten.

SUMBER DANA

- a. Pendanaan untuk program hibah ini adalah bersumber dari APBN dan APBD. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan 80% dari total kebutuhan pengembangan di desa/kelurahan sasaran tersebut;
- b. Dana BLM bersumberkan dari APBN sebesar 50% dan APBD minimal 50% dari nilai total usulan kabupaten untuk kegiatan peningkatan kinerja SPAM di luar porsi kontribusi masyarakat. BLM APBN dan APBD dimanfaatkan untuk desa yang berbeda (satu desa satu sumber dana);
- c. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari in cash dan/atau in kind minimal 20% dari total kebutuhan. Khusus untuk HKP PPB masyarakat tidak diwajibkan untuk kontribusi.

KRITERIA DESA SASARAN HKP

NO	HKP
1	Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas, dan sudah berlangsung minimal 2 tahun;
2	Merupakan desa Pamsimas (APBN/APBD) dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, namun tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, kecuali dalam hal SPAM Desa Pamsimas tersebut mengalami kerusakan akibat kejadian luar biasa (Force Majeure) kurang dari 2 tahun dapat diusulkan dalam Paket HKP.
3	Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari jumlah pemanfaat semula;
4	Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan kegiatan pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini dalam bentuk in cash 4% (baik dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dana kas BPSPAMS/KPSPAMS) dan in kind sebesar 16%;
5	Memenuhi biaya pembangunan SPAM per penerima manfaat yang efisien;

KRITERIA DESA SASARAN HKP

NO	HKP
6	Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tarif pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan <i>recovery</i> dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS/KPSPAMS, dan Ketua KKM;
7	Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra LKM/KKM dan BPSPAMS/KPSPAMS dalam pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan.

TAHAPAN PENYUSUNAN PROPOSAL HKP

PEMILIHAN DESA SASARAN SOSIALIASI (POKJA AMPL/PAKEM)

- Desa Pamsimas yang telah selesai pembangunan fisiknya;
- Memiliki potensi tambahan jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari pemanfaat saat ini;

SOSIALIASI DESA SASARAN HKP (POKJA AMPL/PAKEM)

- Masyarakat bersedia kontribusi 20%;
- Masyarakat bersedia menerapkan tariff 'O&M recovery';
- Bersedia menunjuk Kader AMPL;

PENYUSUNAN PROPOSAL DESA (TIM PENYUSUN PROPOSAL DESA)

- Difasilitasi oleh SKPD Kecamatan;
- Formulir proposal desa sesuai format yang ditentukan dalam Juknis;

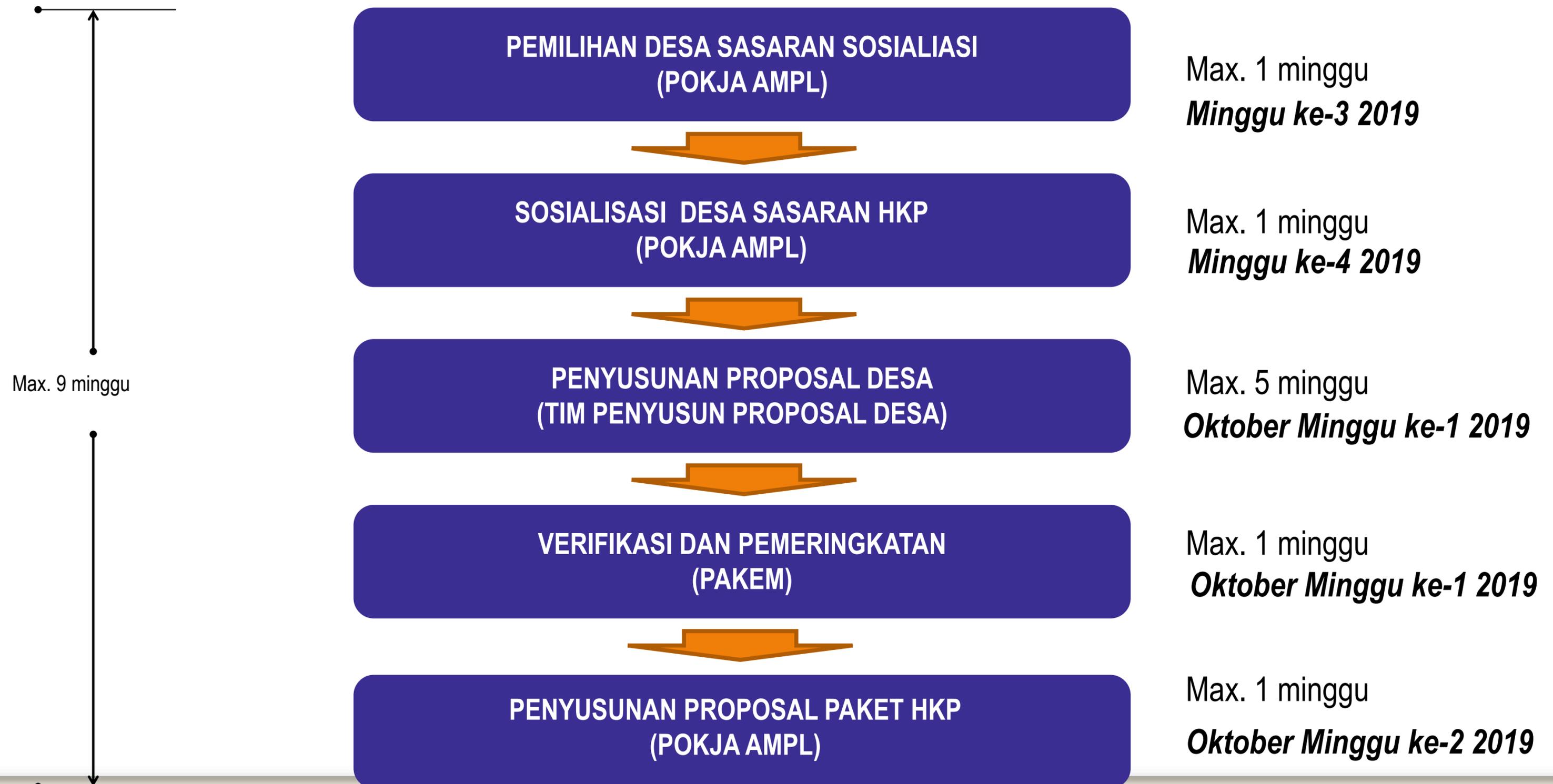
VERIFIKASI DAN PEMERINGKATAN (PAKEM)

- Kesesuaian menu pemanfaatan
- Efisiensi biaya pembangunan SPAM per jiwa pemanfaat;

PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HKP (POKJA AMPL)

- Kesepakatan hasil verifikasi Pakem;
- Evaluasi ketersediaan APBD;
- Melengkapi dokumen proposal;

JADWAL PENYUSUNAN PROPOSAL HKP



JENIS KEGIATAN DALAM PROPOSAL

No	Menu	Tujuan	Paket Program
1	Optimalisasi SPAM	Pemulihan dan pengembangan SPAM yang tidak/sebagian berfungsi untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan Pamsimas	HKP
2	Pelatihan BPSPAMS (non-fisik)	Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan pemeliharaan SPAMS dan keuangan BPSPAMS	HKP

JENIS KEGIATAN YANG DIHINDARI DALAM PROPOSAL

- ❖ Jenis kegiatan yang termasuk *'negative list'* dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas ditingkat Masyarakat, seperti:
 - Pembebasan lahan
 - Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahun-tahun sebelumnya;
 - Pembangunan/sewa kantor KKM

KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HKP

1. Surat Pernyataan Bupati/ Walikota, yang berisi:
 - Jumlah alokasi APBD untuk membiayai BLM, BOP Pakem dan Asosiasi SPAMS Perdesaan Kab./Kota;
 - Kesiediaan menyampaikan salinan APBD/APBD-P yang telah mencantumkan alokasi APBD untuk penyelenggaraan HIK/HKP;
 - Kesiediaan mengikuti petunjuk teknis HIK/HKP.

2. Proposal Desa, yang berisi:
 - Data dasar desa/kelurahan
 - Data kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM):
 - ✓ Kondisi SPAM saat ini
 - ✓ Kondisi SPAM yang diusulkan
 - Rencana biaya pembangunan (Fisik dan Non Fisik)
 - Lampiran:
 - ✓ Surat pengajuan proposal oleh Kepala Desa
 - ✓ Surat pernyataan dari tim penyusun proposal
 - ✓ Peta rencana pengembangan SPAM

3. Lampiran, yang sekurang-kurangnya memuat:

- Salinan Perda RPJMD atau Perbup RAD-AMPL;
- Salinan Berita Acara Hasil Seleksi Proposal Desa;
- Salinan Proposal Desa;

RUJUKAN FORMAT PROPOSAL HKP

Format Proposal Paket Pamsimas HKP

**Lampiran-1
Juknis HKP**

**Lampiran-2
Juknis HKP**

Proposal Desa/Kel. Dan Surat Pengajuan Proposal Paket HKP

FORMAT LAMPIRAN PROPOSAL HKP

No	Usulan Menu Pemanfaatan Paket	Usulan Nama Desa-desas/Kel Sasaran	Rencana (Target) Tambahan Penerima Manfaat (Jiwa)	Biaya (Rp)	Biaya Per Penerima Manfaat (Rp/jiwa)	Sumber Dana APBN/APBD	Tahun Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)

Disusun Oleh :

Ketua Pokja AMPL
Kabupaten/Kota

(.....)

Ketua Asosiasi Pengelola
SPAMS Perdesaan
Kabupaten/Kota

(.....)

Menyetujui

Bupati/Walikota.....

(.....)

KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HKP

- ❖ Komitmen penyediaan dana APBD TA. 2018/2019 untuk:
 - Pembiayaan dana BLM
 - Pembiayaan BOP Pakem dan Asosiasi

- ❖ Efisiensi biaya pembangunan SPAM (biaya/jiwa)

- ❖ Verifikasi proposal desa:
 - Kesesuaian usulan kegiatan fisik dan non fisik
 - Komitmen untuk penyesuaian tarif/iuran air minum dan penyediaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

HIBAH INSENTIF DESA

KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

- Hibah Insentif Desa (HID) diberikan kepada desa Pamsimas yang telah menunjukkan kinerja yang baik.
- Kriteria penilaian kinerja antara lain adalah mempunyai kinerja keberfungsian sarana yang baik, penerapan tarif oleh KP-SPAMS dan masyarakat, serta terdapat kelompok masyarakat sudah bebas buang air sembarangan.
- HID diberikan untuk pengembangan SPAM dengan tujuan menambah cakupan pelayanan air minum pada desa tersebut termasuk optimalisasi yang sudah dibangun melalui program Pamsimas.

Prinsip Penyelenggaraan HID

- Program Pamsimas akan memberikan HID kepada Kelurahan yang “berprestasi” yang mempunyai kinerja terbaik. Kelurahan reguler maupun Kelurahan replikasi Pamsimas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi / berkompetisi dalam proses seleksi Kelurahan HID.

Tujuan HID

Tujuan penyediaan HID adalah mendukung pemerintah kabupaten pelaksana Pamsimas untuk:

- ❖ Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi di desa Pamsimas yang mempunyai tingkat keberfungsian yang baik;
- ❖ Penguatan keberlanjutan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan dan pembinaan pasca proyek;
- ❖ Perluasan cakupan pelayanan SPAMS di tingkat desa dalam mencapai Universal Access;
- ❖ Mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi.

Sumber Dana HID

- ❖ Dana Hibah Insentif Desa bersumber dari dana BLM APBN. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan minimal 80% dari total kebutuhan pengembangan di desa/kelurahan sasaran tersebut;
- ❖ Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari in cash dan/atau in kind minimal 20% dari total nilai rencana.

Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten

Kriteria yang digunakan dalam pra-seleksi Desa untuk menentukan kelayakan Desa untuk masuk ke dalam daftar panjang kabupaten/kota, yaitu:

- Merupakan desa sasaran Pamsimas dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 1 th.
- SPAM berfungsi baik;
- Belum menerima HAMP, HIK, dan HID;
- Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM, menjadi akses 100% air minum tingkat desa;
- Memiliki sumber air baku untuk SPAM baru dan/atau idle capacity dari SPAM eksisting;
- Telah menerapkan iuran dan bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan iuran minimal dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan. Dibuktikan dengan surat pernyataan KP-SPAMS dan disahkan oleh pemerintah desa

- KP-SPAMS memiliki rencana kerja yang disahkan oleh pemerintah desa.
- Pemerintah Desa diharapkan menyediakan dana untuk ikut berkontribusi dalam membiayai RKM dari APBDesa;
- Desa mempunyai RKM menuju akses universal air minum dan sanitasi, dengan prioritas layanan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keterbatasan gerak (disabilitas) serta Ibu hamil dan anak dibawah 2 (dua) tahun;
- Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari in cash dan/atau in kind minimal 20% dari nilai BLM dalam RKM;
- Memenuhi biaya pembangunan SPAM per-penerima manfaat yang efisien;
- Desa ODF (SBS).
- Menjadi Anggota Asosiasi Pengelola SPAMS "Tirta Cemerlang" yang dibuktikan dengan sertifikat anggota.

Tahapan Seleksi Lokasi HID

Penetapan Kabupaten sasaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

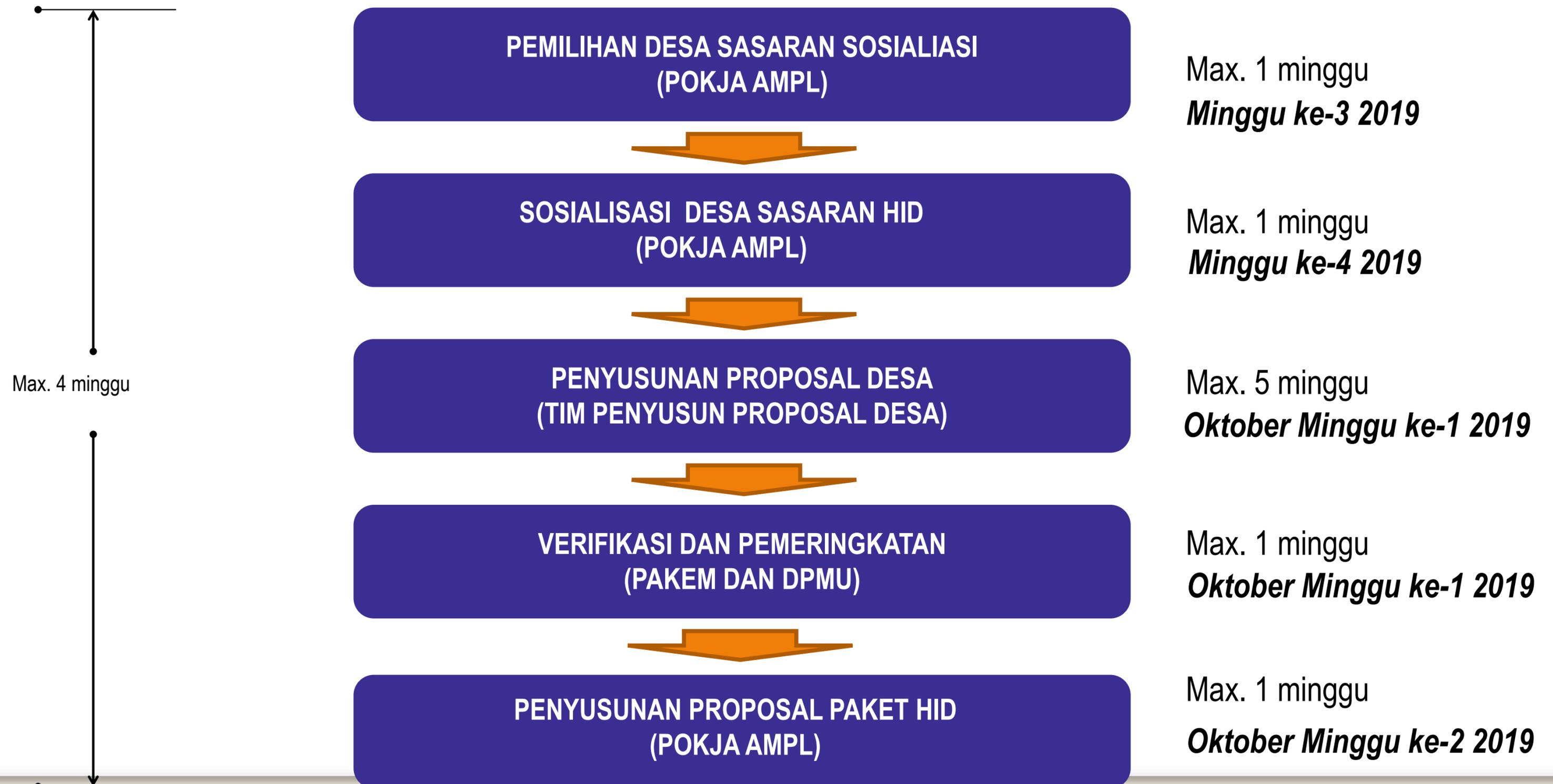
- Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, memberitahukan adanya penjangkaran minat kepada **kabupaten calon peserta Program Hibah Insentif Desa (HID) dengan lampiran longlist desa** yang memenuhi kriteria HID;
- Prosedur pemilihan desa dilakukan berdasarkan **Petunjuk Teknis Pemilihan Desa**;
- Prosedur perencanaan desa dilakukan berdasarkan **Petunjuk Teknis Perencanaan Tingkat Masyarakat**;

- Kabupaten yang berminat mengikuti Program HID, **mengirim surat usulan untuk mengikuti Program HID, dilengkapi daftar desa sasaran Program HID, daftar desa sasaran sesuai dengan longlist** yang dikeluarkan oleh Direktur PSPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- CPMU Pamsimas **melakukan verifikasi terhadap usulan** dari kabupaten, berdasarkan kriteria Hibah Insentif Desa antara lain:
 - ❖ CBR (Cost Beneficiaries Ratio) mengacu ke masing-masing CBR rata-rata Kabupaten;
 - ❖ Pemenuhan In-cash dan/atau in-kind;
 - ❖ Ketersediaan sumber air baku (CAT) atau iddle capacity;
 - ❖ Kelengkapan kesediaan berurusan;
 - ❖ Maksimal usulan BLM Rp.245 juta;
 - ❖ Tidak memiliki hutang kewajiban sharing APBD;

Tahap Penetapan Kelurahan Pelaksana HID, dilakukan di tingkat Pusat

- Dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Dirjen Cipta Karya; untuk ditetapkan melalui SK Dirjen Cipta Karya;

JADWAL PENYUSUNAN PROPOSAL HID



TERIMA KASIH